JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

**MIGRASI BERULANG TENAGA KERJA MIGRAN INTERNASIONAL:
KASUS PEKERJA MIGRAN ASAL DESA SUKOREJO WETAN,
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**(REPEATED INTERNATIONAL LABOR MIGRATION:
THE CASE OF INDONESIAN LABOR MIGRANTS OF SUKOREJO WETAN
VILLAGE, TULUNGAGUNG DISTRICT)**

Mita Noveria

Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi Penulis: *mita_noveria@yahoo.com*

Abstract

Working overseas is an attempt to earn higher income and to accumulate financial capitals to run small enterprise in migrants' place of origins. In fact, many Indonesia returned migrants decided to re-migrate, either to previous countries or to new destination countries. This paper aims to assess factors that cause remigration of the returned labor migrants. This study used quantitative and qualitative data, based on research in one of major international labor migrants sending village in Indonesia, namely Sukorejo Wetan in Tulungagung District. Quantitative data was collected through survey on selected households, while qualitative data was gathered by in-depth interview, focus group discussion (FGD), and observation. The analysis shows four dominant factors that caused returned migrants to re-migrate, namely: (1) the remittances only sufficed consumption needs; (2) the returned migrants faced difficulties in adapting to labor force conditions at place of origins (i.e., job scarceness and low wage); (3) limited ability in entrepreneurship; and (4) availability of social network that facilitates remigration.

Keywords: *International Labor Migration; Returned Migrants; Repeated Migration; Remittances*

Abstrak

Bekerja di luar negeri merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan mengumpulkan modal finansial untuk berwirausaha di daerah asal migran. Pada kenyataannya, banyak tenaga kerja migran Indonesia, yang telah pulang ke daerah asal, memutuskan untuk bermigrasi kembali, baik ke negara tempat bekerja sebelumnya maupun ke negara tujuan yang baru. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi berulang oleh mantan tenaga kerja internasional. Studi ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif pada penelitian di Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung, salah satu desa pengirim tenaga kerja Indonesia. Data kuantitatif diperoleh melalui survei pada rumah tangga terpilih, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD (*focus group discussion*), dan observasi. Hasil analisis menunjukkan empat faktor dominan yang menyebabkan terjadinya migrasi tenaga kerja internasional secara berulang, yaitu: (1) penghasilan selama bekerja di luar negeri yang dikirim ke daerah asal hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi; (2) mantan tenaga kerja internasional sulit beradaptasi dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah asal, terutama keterbatasan kesempatan kerja dan upah yang rendah; (3) keterbatasan kemampuan berwirausaha; dan (4) keberadaan jaringan sosial yang mendukung terjadinya migrasi berulang.

Kata Kunci: Migrasi Tenaga Kerja Internasional, Migran Kembali, Migrasi Berulang, Remitansi

PENDAHULUAN

Migrasi penduduk melewati batas wilayah negara dengan tujuan untuk bekerja merupakan fenomena kependudukan yang telah terjadi sejak lama di Indonesia. Sejarah migrasi tenaga kerja asal Indonesia bahkan sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1890. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengirim tenaga kerja asal Jawa, Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname, menggantikan pekerja asal Afrika yang telah dipulangkan ke negara mereka (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia [BNP2TKI], 2011). Pengiriman (selanjutnya disebut dengan istilah penempatan) tenaga kerja Indonesia (TKI) terus berlangsung setelah Indonesia merdeka dengan mengalami berbagai perubahan, termasuk pihak yang melakukan penempatan dan negara-negara tujuan penempatan.

Banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara sumber tenaga kerja migran internasional. Indonesia termasuk dalam sembilan negara pengirim tenaga kerja yang utama di Asia (Orbeta Jr, 2013; Nguyen & Purnamasari, 2014). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia mengirim sebanyak 494.609 tenaga kerja ke luar negeri (Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI, 2016). Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 512.168 orang. Namun, selama dua tahun setelahnya terjadi penurunan, yaitu 429.872 orang (2014) dan 275.736 orang (2015). Besar kemungkinan penurunan ini disebabkan oleh kebijakan moratorium pengiriman TKI, khususnya untuk penata laksana rumah tangga ke negara-negara di Timur Tengah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan 19 negara yang dilarang menjadi tujuan penempatan TKI, antara lain Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Migrasi tenaga kerja internasional pada umumnya dilakukan karena keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Perbedaan penghasilan di dalam dan di luar negeri juga menjadi salah satu penyebab sebagian penduduk usia kerja bermigrasi ke luar negeri, termasuk ke negara-negara Asia (Hatton & Williamson, 2002). Ini didukung oleh ketersediaan

kesempatan yang lebih luas, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kurang atau bahkan tidak diminati oleh tenaga kerja lokal. Sejalan dengan perkembangan waktu dan di tengah globalisasi yang melanda dunia, yang antara lain ditandai dengan makin mudahnya perpindahan orang, barang, dan jasa melewati batas geografis negara, terjadi pula perubahan dalam fenomena migrasi TKI. TKI tidak hanya terbatas pada mereka dengan kualifikasi rendah (*low skilled*) seperti penata laksana rumah tangga dan pekerja kasar di sektor pertanian, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tinggi, seperti perawat dan tenaga ahli di bidang minyak dan gas.

Salah satu konsekuensi nyata dari aktivitas migrasi adalah remitansi yang diterima oleh keluarga migran di daerah asal mereka (McKenzie, 2006). Dalam hal ini, remitansi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi rumah tangga. Tidak hanya di tingkat rumah tangga, remitansi juga merupakan konsekuensi nyata dari migrasi di tingkat yang lebih tinggi, yaitu negara. Selama semester pertama (Januari-Juni) 2016 jumlah remitansi yang tercatat sebesar Rp62 triliun (US\$4,5 miliar), suatu jumlah yang cukup berarti untuk menopang perekonomian Indonesia (BNP2TKI, 2016). Di negara pengirim tenaga kerja internasional lainnya seperti Filipina, remitansi dari pekerja migran internasionalnya di berbagai negara merupakan sumber utama penerimaan luar negeri (Cabegin & Alba, 2014). Terkait pemanfaatan remitansi, Adams Jr & Cuecuecha (2014) menyebutkan terdapat tiga kategori. *Pertama*, remitansi dipandang sebagai penghasilan rumah tangga, sehingga digunakan sebagaimana layaknya pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan di dalam negeri. *Kedua*, penerimaan remitansi dipandang sebagai penyebab terjadinya perubahan perilaku konsumsi, dalam arti lebih cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif daripada untuk investasi. *Ketiga*, remitansi dipandang sebagai penghasilan sementara (tidak kontinu) yang digunakan untuk keperluan investasi, baik investasi sumber daya manusia seperti pendidikan maupun barang, misalnya rumah.

Selain untuk mendapatkan pekerjaan, migrasi tenaga kerja ke luar negeri bertujuan untuk mengumpulkan modal finansial yang akan digunakan untuk membuka usaha ekonomi setelah kembali ke daerah asal (Piracha & Vadean, 2010). Penghasilan di luar negeri yang pada umumnya lebih besar daripada di daerah asal memungkinkan pekerja migran memiliki tabungan untuk modal menjalankan usaha ekonomi di daerah asal (Demurger & Xu, 2011; de Haas & Fokkema, 2011; Black, King & Tiemoko, 2003). Kenyataan ini

juga ditemui di antara mantan TKI di beberapa daerah di Indonesia. Anwar (2013) dalam studinya di salah satu desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa lebih dari separuh responden yang merupakan mantan TKI menggunakan remitansi untuk modal usaha setelah kembali ke daerah asal. Dengan memanfaatkan penghasilan selama bekerja di luar negeri sebagai modal usaha, diharapkan mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri. Lebih dari itu, para mantan TKI dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah asal, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam kenyataan, kondisi ideal seperti di atas tidak selamanya dapat dicapai. Tidak jarang para mantan TKI yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan - paling tidak untuk mereka sendiri - terpaksa harus kembali melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Kegiatan migrasi ke luar negeri bahkan dilakukan lebih dari dua kali oleh sebagian migran yang sudah kembali ke daerah asal. Hal ini antara lain karena usaha ekonomi yang dilakukan tidak dapat berkembang, yang pada gilirannya menyebabkan habisnya modal usaha yang dimiliki. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih berfokus pada pengaturan penempatan TKI di luar negeri (Palmer, 2016) dan sebaliknya, kurang memberi perhatian pada reintegrasi mantan TKI di daerah asal, termasuk pada kegiatan ekonomi. Akibatnya, mereka yang tidak berhasil dalam aktivitas ekonomi kembali bekerja ke luar negeri untuk mempertahankan hidup (Anwar, 2015).

Beranjak dari kondisi tersebut, perlu dikaji penyebab mantan TKI kembali melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara berulang. Artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, diikuti oleh bagian kedua yang berisi tinjauan umum mengenai migrasi tenaga kerja internasional yang menjadi kerangka pikir dari tulisan ini. Bagian selanjutnya membahas pemanfaatan remitansi oleh keluarga TKI di daerah asal mereka. Pemanfaatan remitansi penting dibahas karena dapat memengaruhi keinginan TKI yang telah pulang ke daerah asal untuk kembali melakukan migrasi internasional. Setelah membahas remitansi, bagian selanjutnya adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi migrasi berulang TKI. Dalam bahasan ini juga disinggung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak agar mantan TKI dapat bertahan hidup di daerah asal dengan melaksanakan usaha ekonomi (berwirausaha)

menggunakan modal yang dikumpulkan selama bekerja di luar negeri. Artikel ini ditutup dengan bagian kesimpulan.

Artikel ini menggunakan data yang bersumber dari penelitian di salah satu desa sumber TKI di Kabupaten Tulungagung, yaitu Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Sukorejo. Daerah ini memiliki sejarah panjang migrasi tenaga kerja, yang dimulai sejak awal tahun 1980-an (Noveria, Romdiati, Setiawan, & Malamassam, 2010). Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kediri, dan Madiun merupakan pelopor penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pada awalnya, TKI asal Kabupaten Tulungagung didominasi oleh mereka yang bertujuan ke Malaysia. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu, daerah tujuan TKI meluas ke berbagai negara lain seperti Singapura, Taiwan, dan Hongkong.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner terstruktur terhadap 110 rumah tangga responden, yaitu rumah tangga yang paling sedikit memiliki satu anggota yang sedang atau pernah bekerja di luar negeri. Pemilihan rumah tangga responden dilakukan secara acak. Selanjutnya, pengumpulan data kualitatif dilakukan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, *focus group discussion (FGD)*, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan 18 orang narasumber dari berbagai latar belakang, seperti mantan TKI (laki-laki dan perempuan), istri TKI dan mantan TKI, orang tua TKI dan mantan TKI, pengurus Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan TKI dan keluarganya, petugas dari perusahaan pengerahan TKI, aparat desa dan kecamatan, serta pejabat dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten dan provinsi. Selanjutnya, FGD dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu dengan mantan TKI laki-laki, isteri TKI, dan suami TKI. Narasumber-narasumber tersebut dipilih secara purposif, berdasarkan penguasaan mereka terhadap data dan informasi yang akan dikumpulkan.

MIGRASI TENAGA KERJA INTERNASIONAL

Migrasi tenaga kerja internasional tidak ubahnya seperti migrasi penduduk pada umumnya. Lee (1966) mengemukakan bahwa terdapat empat kelompok faktor yang berperan dalam aktivitas kependudukan ini, yaitu faktor yang berkaitan dengan daerah asal, faktor yang berhubungan dengan daerah tujuan, faktor hambatan antara (*intervening obstacles*), dan faktor individu. Selanjutnya, Van Hear, Bakewell & Long (2012) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya

migrasi dapat dikelompokkan menjadi empat. Pertama adalah faktor mendasar yang memengaruhi migrasi (*predisposing factors*), antara lain perbedaan struktural antara daerah asal dan daerah tujuan yang disebabkan oleh politik ekonomi makro. Faktor kedua adalah faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya migrasi (*proximate factors*), seperti menurunnya aktivitas ekonomi/bisnis dan gangguan keamanan serta ancaman terhadap hak-hak asasi manusia. Faktor ketiga adalah faktor pemicu atau yang mempercepat terjadinya migrasi (*precipitating factors*). Termasuk dalam faktor ini antara lain lonjakan pengangguran dan gangguan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, serta layanan sosial lainnya. Terakhir, faktor keempat adalah faktor antara (*mediating factors*), yaitu faktor yang memfasilitasi/mendukung, menghambat, mempercepat, mengurangi atau memperkuat terjadinya migrasi. Ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan informasi merupakan sebagian dari faktor keempat ini. Keempat faktor tersebut berperan dan memengaruhi seseorang dalam membuat keputusan untuk bermigrasi. Ada kemungkinan faktor-faktor dominan yang memengaruhi terjadinya migrasi berbeda antar-individu.

Seperti halnya migrasi penduduk secara umum, tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab terjadinya migrasi tenaga kerja internasional. Teori-teori yang dikemukakan oleh banyak ahli menyebutkan bahwa migrasi penduduk internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor mikro dan makro. Teori *neoclassical economy* mengemukakan bahwa, dalam konteks makro, migrasi tenaga kerja internasional terjadi karena adanya perbedaan kesempatan kerja serta gaji/upah antara negara pengirim dan penerima (Massey dkk., 1993; de Haas, 2008). Oleh sebab itu, terjadi aliran migrasi tenaga kerja dari berbagai negara dengan upah rendah ke negara-negara berupah tinggi, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya, menurut teori ini, di tingkat mikro, migrasi internasional merupakan wujud dari investasi modal manusia. Dalam konteks ini, migrasi internasional dilandasi oleh keinginan untuk menggunakan kemampuan dan keterampilan secara lebih produktif di daerah tujuan. Namun demikian, untuk melakukan migrasi juga diperlukan modal finansial untuk biaya perjalanan dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, dituntut kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru di daerah tujuan, termasuk bahasa dan budaya serta beradaptasi dengan pasar kerja yang baru (Massey dkk., 1993).

Teori lain mengenai migrasi internasional yang berpijak pada tingkat makro adalah teori *dual labor market*. Menurut Piore (1979 dikutip dalam Massey, dkk., 1993), migrasi internasional terjadi karena adanya kebutuhan tenaga kerja di negara-negara yang sudah berkembang. Faktor-faktor pendorong di daerah asal, seperti upah rendah dan tingkat pengangguran tinggi, tidak berperan dalam memengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi. Artinya, seseorang melakukan migrasi lebih karena motivasi untuk bekerja di daerah tujuan karena permintaan tenaga di sana.

Tanpa mengabaikan beberapa teori lainnya mengenai migrasi internasional, kedua teori di atas cukup memberikan pemahaman mengenai fenomena migrasi tenaga kerja internasional, terutama alasan yang mendasarinya. Migrasi tenaga kerja internasional diperkirakan akan terus berlangsung selama masih terjadi perbedaan kesempatan kerja dan upah antarnegara serta adanya permintaan tenaga kerja di negara-negara maju, khususnya yang mengalami kekurangan penduduk usia produktif. Lebih lanjut, proses globalisasi yang tengah melanda dunia memfasilitasi terjadinya migrasi dalam jumlah yang makin meningkat dan secara geografis memperluas negara tujuan migrasi (Czaika & de Haas, 2014). Kemajuan teknologi dan makin meluasnya jaringan komunikasi mempermudah migrasi, misalnya dengan tersedianya informasi terkait kondisi dan kesempatan kerja di daerah tujuan (Constant, Nottmeyer, & Zimmermen, 2012). Selain itu, jaringan transportasi yang sudah mengglobal memudahkan orang untuk mencapai daerah tujuan migrasi dan bahkan dengan biaya yang lebih murah. Ditambah dengan makin luasnya jaringan sosial, misalnya keberadaan diaspora di berbagai negara, memudahkan orang untuk pindah ke berbagai negara (The Global Commission on International Migration, 2005). Sebagai konsekuensinya, arus migrasi internasional semakin tidak terbandung.

REMITANSI: SALAH SATU KONSEKUENSI NYATA DARI MIGRASI TENAGA KERJA INTERNASIONAL

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, salah satu konsekuensi nyata dari migrasi tenaga kerja, termasuk yang melintasi batas negara, adalah remitansi, yaitu uang yang dikirim pulang ke daerah asal. Remitansi berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi keluarga yang ditinggalkan (Bodvarsson & Van den Berg, 2013; Dustmann & Mestres, 2008; Dustmann, 1997). Dalam studinya di Maroko, de Haas (2006) menemukan bahwa remitansi yang berasal dari migran internasional berkontribusi

sekitar 53-59 persen terhadap pendapatan rumah tangga mereka di daerah asal. Selain sebagai sumber pendapatan, remitansi merupakan tabungan (Dustmann & Mestres, 2008) yang akan dimanfaatkan setelah migran kembali ke daerah asal, antara lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi, selain yang telah digunakan untuk membeli aset-aset produktif seperti lahan pertanian.

Remitansi yang dikirim ke daerah asal berperan pula dalam mengurangi kemiskinan (de Haas, 2006; Adam Jr & Page, 2005) dan meningkatkan taraf kehidupan migran dan keluarganya. Adam Jr & Page melakukan analisis dampak remitansi dari migran internasional terhadap penurunan kemiskinan di negara penerima, mencakup 71 negara berkembang di berbagai belahan dunia, seperti Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Timur, termasuk Indonesia. Hasil analisis panel data¹ memperlihatkan bahwa peningkatan remitansi sebesar 10 persen menyebabkan penurunan proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah US\$1 per hari sebesar 2,1 persen. Selanjutnya, peningkatan 10 persen pendapatan negara yang berasal dari remitansi berakibat pada penurunan proporsi penduduk miskin sebesar 3,5 persen (Adam Jr & Page, 2005).

Dalam konteks yang lebih luas, remitansi juga menjadi sumber pendapatan luar negeri yang mengalami peningkatan pada beberapa negara berkembang (Ratha, 2005). Pada tahun 2012 remitansi migran ke negara berkembang berjumlah US\$401 miliar (Ratha, 2013). Filipina, salah satu negara pengirim tenaga kerja migran yang dominan di Asia Tenggara, misalnya, menerima remitansi dengan jumlah lebih dari US\$20 milyar pada tahun 2009 (Bodvarsson & Van den Berg, 2013). Di banyak negara berkembang, lebih dari 20 persen GDP berasal dari remitansi tenaga kerja di luar negeri (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2011). Oleh karena itu, remitansi tidak hanya bermanfaat untuk kelangsungan hidup tenaga kerja migran dan keluarganya, tetapi juga bagi daerah asal mereka karena dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Terlebih lagi jika setelah kembali tinggal di daerah asal mantan migran melakukan usaha ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di sekitarnya. Ini secara tidak langsung dapat menggerakkan roda perekonomian.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, remitansi yang diterima dari TKI di berbagai negara pada tahun 2016 berjumlah US\$8,86 juta. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2015 (US\$9,42 juta), jumlah ini lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, yaitu sebesar US\$8,44 juta (2014), US\$7,42 juta (2013), US\$7,02 juta (2012), dan US\$6,74 juta (2011) (Bank Indonesia, tanpa tahun-a). Besar kemungkinan jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan remitansi yang sesungguhnya. Jumlah yang tercatat di Bank Indonesia adalah remitansi yang dikirim melalui lembaga keuangan resmi, seperti bank. Dalam kenyataannya, banyak TKI yang mengirimkan remitansi melalui cara lain, terutama dengan menitipkan kepada TKI yang pulang kampung atau membawa sendiri tabungan selama bekerja di luar negeri dalam bentuk uang tunai ketika mereka kembali ke daerah asal. Hal ini tidak hanya terjadi di antara TKI, tetapi juga tenaga kerja internasional dari berbagai negara lainnya (Adam Jr & Page, 2005; Bodvarsson & Van den Berg, 2013).

Secara keseluruhan jumlah remitansi yang dikirim oleh TKI di berbagai negara jauh lebih besar daripada remitansi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Data Bank Indonesia memperlihatkan bahwa remitansi tenaga kerja asing sebesar US\$2,09 juta pada tahun 2011. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu US\$2,40 juta (2012), US\$2,61 juta (2013), US\$2,71 juta (2014), US\$3,03 juta (2015), dan US\$3,38 juta (2016) (Bank Indonesia, tanpa tahun-b). Survei nasional mengenai tenaga kerja asing di Indonesia (*National Survey on Foreign Workers in Indonesia*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia menemukan bahwa sekitar 36 persen tenaga kerja asing dari negara-negara di ASEAN mengirim remitansi sebesar Rp10 juta-Rp25 juta per bulan. Selanjutnya, 28 persen mengirim sebesar Rp25 juta-Rp50 juta dan 11 persen mengirim sebanyak Rp50 juta-Rp75 juta. Tenaga kerja asal Amerika Serikat mengirim remitansi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Survei tersebut menemukan sebanyak 56 persen tenaga kerja asal negara ini mengirim remitansi rata-rata sebesar Rp10 juta-Rp25 juta per bulan. Selanjutnya, 22 persen mengirim sebesar Rp25 juta-Rp50 juta. Hanya sekitar 11 persen yang mengirimkan remitansi di bawah Rp10 juta (Bank Indonesia, 2010).

¹ Panel data yang digunakan berasal dari tahun yang berbeda-beda, berkisar antara tahun 1985-1998, sesuai dengan ketersediaan data di masing-masing negara. Untuk Indonesia, data yang digunakan adalah data tahun 1987, 1993, 1996, dan 1998. Dalam empat tahun tersebut,

jumlah remitansi dari TKI yang diterima Indonesia sebesar US\$86, US\$346, US\$796, dan US\$959 juta secara berturut-turut.

PENGUNAAN REMITANSI OLEH TKI DAN KELUARGANYA

Pada bagian sebelumnya telah dibahas kategori penggunaan remitansi di antara migran dan keluarganya. Penggunaan remitansi ditentukan oleh pandangan TKI dan keluarganya terhadap uang yang dikirimkan ke daerah asal. Salah satu diantaranya adalah penghasilan selama bekerja di luar negeri dipandang dan diperlakukan sama dengan penghasilan yang bersumber dari pekerjaan di daerah asal (di dalam negeri) (Adams Jr & Cuecuecha, 2014).

Studi mengenai penggunaan remitansi oleh para migran dan keluarganya telah dilakukan di berbagai negara (Arifuzzaman, Al Mamun, Chowdhury, & Dewri, 2015; McKenzie & Menjivar, 2011; Dustmann & Mestres, 2008; Abazi & Mema, 2007; Romdiati, Noveria, & Bandiyono, 2002; Raharto dkk., 2013). Secara umum terdapat kesamaan dalam hasil studi tersebut, yaitu remitansi dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan keluarga yang ditinggalkan di daerah asal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ditemukan kenyataan bahwa penggunaan remitansi yang paling dominan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini juga ditunjukkan oleh hasil penelitian di Desa Sukorejo Wetan. Dari seluruh keluarga TKI yang menjadi responden penelitian, sekitar 84,5 persen menggunakan remitansi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh anggota rumah tangga² (Tabel 1).

Berdasarkan temuan penelitian di atas, jelas terlihat bahwa tujuan TKI bekerja di luar masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan hidup. Kenyataan yang sama juga ditemukan di antara keluarga migran internasional di negara lain. Di Albania, misalnya, studi Abazi & Mema (2007) menemukan bahwa penggunaan utama remitansi adalah untuk konsumsi, diikuti dengan biaya pendidikan anak-anak. Lebih lanjut, di kalangan perempuan Honduras yang ditinggalkan suami atau anak-anak mereka untuk bekerja ke luar negeri, penggunaan remitansi dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki gizi anggota rumah tangga, membeli pakaian baru, dan membiayai pendidikan anak-anak

(McKenzie & Menjivar, 2011). Studi di tiga provinsi lain di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Riau juga memperlihatkan hal yang sama. Lebih dari separuh rumah tangga migran di ketiga provinsi tersebut menggunakan remitansi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Romdiati dkk., 2002; Raharto dkk., 2013). Studi-studi tersebut mengonfirmasi argumen yang menyatakan bahwa remitansi sebagai pekerja migran internasional dipandang dan diperlakukan sama dengan pendapatan di dalam negeri, khususnya di daerah asal.

Tabel 1. Distribusi Rumah Tangga Responden Menurut Pemanfaatan Remitansi (%)

Jenis Penggunaan Remitansi	Penggunaan Remitansi		Jumlah (N = 118)
	Ya	Tidak	
Kebutuhan sehari-hari	84,5	15,5	100,0
Pendidikan	51,8	48,2	100,0
Kesehatan	25,5	74,5	100,0
Pembangunan/renovasi rumah	49,1	50,9	100,0
Pembelian kendaraan	51,8	48,2	100,0
Usaha produktif	11,8	88,2	100,0
Lainnya ³	11,8	88,2	100,0

Sumber: Data primer

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, penggunaan remitansi yang relatif besar adalah untuk keperluan konsumtif, yaitu membeli kendaraan. Dua kemungkinan dapat menjelaskan pilihan ini. Pertama, kendaraan memang sangat diperlukan oleh rumah tangga untuk transportasi, sehingga dapat dipandang sebagai kebutuhan pokok. Kedua, membeli kendaraan merupakan upaya untuk meningkatkan status sosial rumah tangga di masyarakat. Ini didasari anggapan di kalangan penduduk Desa Sukorejo Wetan bahwa indikator keberhasilan sebagai TKI adalah kepemilikan kendaraan bermotor (wawancara dengan beberapa narasumber di lokasi penelitian). Bagi TKI yang belum menikah, membeli kendaraan bermotor bahkan menjadi prioritas utama penggunaan remitansi, di samping berbagai barang konsumtif lainnya, seperti telepon genggam. Hal ini dikemukakan oleh narasumber yang diwawancarai dalam penelitian, seperti petikan wawancara berikut.

² Kepada seluruh responden ditanyakan penggunaan remitansi untuk berbagai keperluan, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, membangun/merenovasi rumah, membeli kendaraan, usaha produktif, dan penggunaan lainnya, seperti untuk keperluan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sangat kecil kemungkinan remitansi digunakan hanya untuk satu keperluan. Artinya, uang yang diterima dari anggota

rumah tangga yang bekerja di luar negeri digunakan untuk berbagai keperluan, dengan proporsi yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Responden diminta menjawab “ya” atau “tidak” untuk setiap kebutuhan.

³ Diantaranya adalah sumbangan untuk acara sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

“Hasil dari Malaysia saya buat beli motor, kalau ndak gitu mana bisa saya punya motor. Nanti kalau butuh uang motor bisa dijual. Dulu waktu berangkat ke Malaysia yang terakhir saya juga jual motor untuk bayar ongkos berangkat...” (Bapak EW, mantan TKI di Malaysia yang masih berkeinginan untuk kembali bekerja di negara tetangga tersebut)

“Menjadi TKI itu supaya bisa punya apa-apa. TKI sukses kalau bisa bikin rumah, beli sepeda motor, punya simpanan hewan dan tanah, punya tabungan. Kalau sudah punya tabungan kan bisa buat beli apa-apa, kalau baru-baru jadi TKI hasilnya buat beli tanah untuk bangun rumah.” (Bapak IR, mantan TKI di Malaysia dan membuka usaha di Desa Sukorejo Wetan)

Hal yang cukup menggembirakan dari penggunaan remitansi adalah cukup besar proporsi rumah tangga responden yang memanfaatkan remitansi untuk kebutuhan pendidikan anak-anak. Ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan anak-anak di masa depan. Berdasarkan wawancara di lokasi penelitian diketahui bahwa banyak orang tua yang sudah menyadari pentingnya pendidikan untuk menentukan pekerjaan anak-anak mereka kelak. Dikatakan pula bahwa dengan pendidikan yang tinggi, anak-anak bisa memperoleh pekerjaan yang memungkinkan mereka bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup di masa depan.

Membangun/merenovasi rumah juga mendapat prioritas dalam penggunaan remitansi. Hal ini terlihat dari perbedaan presentase yang sangat kecil antara penggunaan untuk membangun/merenovasi rumah dan membeli kendaraan bermotor serta pendidikan anak-anak. Memiliki rumah ber dinding tembok dan lantai keramik (penduduk setempat menyebutnya dengan istilah *magrong-magrong* = megah) merupakan salah satu keinginan yang bagi sebagian orang tidak bisa dipenuhi tanpa bekerja ke luar negeri. Penghasilan lebih besar yang bisa diperoleh dengan menjadi TKI diharapkan dapat mewujudkan keinginan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keinginan untuk memiliki ‘rumah batu’ menjadi salah satu alasan yang mendasari aktivitas migrasi internasional untuk bekerja. Ini dikemukakan oleh salah seorang narasumber, seperti dalam kutipan berikut.

“Saya pergi ke Malaysia supaya bisa bikin rumah gedung seperti orang lain. Pokoknya kalau orang punya rumah gedung, saya juga kepingin punya yang seperti orang. Kalau terus-terus di kampung hasil kerja ndak bisa

untuk bangun rumah, buat makan saja susah...” (Bapak AM, mantan TKI di Malaysia)

Kondisi yang sama juga ditemui di antara tenaga kerja migran di negara lain, misalnya di Albania. Salah seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya untuk bekerja di luar negeri mengatakan bahwa alasan utama suaminya bermigrasi adalah untuk memperbaiki rumah, termasuk membangun dapur baru dan ruangan untuk anak-anak (McKenzie & Menjivar, 2011). Hal ini sejalan dengan kutipan wawancara dengan Bapak AM di atas, bahwa hanya dengan bekerja di luar negeri mereka bisa memiliki rumah dengan kondisi yang lebih baik.

Kontras dengan semua kebutuhan di atas, proporsi rumah tangga responden yang menggunakan remitansi untuk usaha produktif merupakan yang paling kecil. Padahal, ini sangat penting untuk kelangsungan hidup rumah tangga, terutama pada saat mereka sudah tidak lagi bekerja di luar negeri. Kepemilikan usaha produktif memungkinkan mereka memperoleh penghasilan yang berkesinambungan, sehingga tidak perlu kembali bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Jika dikaitkan dengan kutipan wawancara dengan Bapak IR di atas, tampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi kebanyakan migran. Ada kemungkinan kepemilikan aset/usaha produktif tidak menjadi prioritas utama dan sebaliknya, kepemilikan kendaraan bermotor dan ‘rumah batu’ menjadi lebih penting di antara mantan TKI dan keluarganya. Kemungkinan lain, remitansi yang diterima baru cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari, membeli kendaraan bermotor, dan membangun/merenovasi rumah. Setelah semua kebutuhan tersebut tercukupi, baru mereka memberi perhatian pada usaha produktif.

Fenomena di atas tampaknya tidak hanya tipikal daerah penelitian. Di beberapa daerah lainnya di Indonesia dan bahkan di luar negeri juga ditemui hal yang serupa. Studi Romdiati dkk. (2002) menemukan hanya satu persen rumah tangga migran di Jawa Barat dan Riau serta 10 persen di Kalimantan Timur yang menggunakan remitansi untuk modal usaha.

Penggunaan remitansi untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga pada umumnya ditemui di antara TKI yang berstatus sebagai kepala rumah tangga atau istrinya. Bagi TKI yang berstatus anak, terutama yang belum menikah, penghasilan selama bekerja di luar negeri cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Keluarga yang ditinggalkan di daerah asal jarang menikmati hasil kerja mereka di luar negeri. Hal ini dikemukakan oleh narasumber, seperti kutipan-kutipan berikut.

“Anak saya itu sudah beberapa tahun kerja nukang di Malaysia, tapi ndak ada hasil, ndak pernah kirim uang pulang. Paling cuma telpon, tanya “waras” (menanyakan kondisi kesehatan). Uangnya dipakai sendiri buat happy-happy.” (Bapak Pr, ayah TKI laki-laki yang bekerja di Malaysia dan belum menikah)

“Kalau saya, gaji ya habis buat senang-senang, beli pakaian, buat melancong. Hari Minggu kan kita libur, terus pergi jalan lah.” (Bapak Mj, mantan TKI yang belum menikah ketika menjadi TKI)

Berdasarkan pembahasan di atas jelas terlihat bahwa penggunaan remitansi masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan primer (konsumsi dan rumah) dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat konsumtif. Penggunaan untuk usaha produktif, termasuk investasi, masih terbatas dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil migran yang mempunyai rencana terkait pekerjaan setelah kembali ke daerah asal, yaitu melakukan usaha ekonomi secara mandiri dengan modal hasil bekerja di luar negeri.

MIGRASI BERULANG TKI: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

Menjadi TKI berulang merupakan fenomena yang biasa ditemui di daerah-daerah pengirim tenaga kerja migran internasional. Ini didukung oleh data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari responden adalah mereka yang pernah bekerja ke luar negeri sebanyak 2-3 kali (Tabel 2). Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, proporsi laki-laki yang sudah 4 kali atau lebih bekerja ke luar negeri jauh lebih besar dibanding perempuan. Sebaliknya, perempuan mendominasi mereka yang bekerja ke luar negeri sebanyak 2-3 kali.

Frekuensi kepergian ke luar negeri yang relatif tinggi dimungkinkan oleh berbagai faktor, diantaranya berhubungan dengan kondisi di daerah asal dan terkait dengan negara tujuan.

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Frekuensi Bekerja ke Luar Negeri dan Jenis Kelamin (%)

Frekuensi Bekerja ke Luar Negeri	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1 kali	16,2	28,0	21,2
2-3 kali	27,9	64,0	43,2
4 kali dan lebih	55,9	8,0	35,6
Jumlah (N)	100,0 (68)	100,0 (50)	100,0 (118)

Sumber: Data primer

Remitansi hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan konsumtif

Jika mengacu pada penggunaan remitansi, sebagian besar hasil bekerja di luar negeri dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan konsumtif lainnya. Hal ini terutama terjadi pada rumah tangga yang hanya mengandalkan remitansi sebagai sumber nafkah. Artinya, tidak ada penghasilan lain yang diperoleh dari anggota rumah tangga yang tinggal di daerah asal. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika kebutuhan sehari-hari dipenuhi dengan menggunakan remitansi, seperti yang dikemukakan oleh seorang narasumber dalam kutipan berikut.

“Uang itu buat kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk anak sekolah, terus lebihnya ditabung lah. Jumlah tabungan ya ndak mesti sama tiap bulan. Kan kebutuhan tiap bulan berbeda-beda, ndak sama...” (Ibu Sn, istri TKI yang bekerja di Saudi Arabia)

Selain kebutuhan konsumsi rumah tangga, kebiasaan penduduk setempat dalam kehidupan bermasyarakat menjadi salah satu sumber pengeluaran rumah tangga migran yang dipenuhi dengan menggunakan remitansi. Kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah *mbecek*⁴, yaitu memberi sumbangan pada acara-acara pernikahan, sunatan, menjenguk anak yang lahir, melayat, dan selamatan membangun rumah. Menurut beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, kebiasaan *mbecek* sudah berlangsung sejak lama dan ada rasa “malu pada diri sendiri” atau “merasa ada hutang” jika tidak *mbecek* pada orang-orang yang menyelenggarakan hajatan. Pengeluaran untuk kepentingan tersebut semakin besar pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat acara pernikahan sering dilaksanakan oleh penduduk desa. Kebutuhan

⁴ Sumbangan yang diberikan biasanya terdiri dari 2 kg beras, 1-1,5 kg gula, dan uang dengan jumlah paling sedikit Rp5.000,00.

untuk *mbecek* tidak jarang menghabiskan penghasilan dalam jumlah relatif besar, bahkan bisa dua kali lebih besar dari pengeluaran rumah tangga sehari-hari (wawancara dengan seorang narasumber).⁵

Kondisi di atas menyebabkan TKI dan keluarganya hanya memiliki sisa uang/tabungan yang terbatas. Padahal tabungan ini antara lain dapat digunakan untuk membuka usaha ekonomi yang dapat menjadi sumber penghasilan di daerah asal. Oleh karena itu, kembali menjadi TKI menjadi pilihan rasional agar mereka bisa memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan seluruh anggota rumah tangga. Salah seorang istri TKI (Ibu Is) yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan bahwa suaminya akan terus bekerja sebagai TKI sampai mereka memiliki tabungan yang cukup untuk digunakan sebagai modal usaha.

Kesulitan beradaptasi kembali dengan daerah asal: kesempatan kerja terbatas dan upah rendah

Setelah kembali ke daerah asal, mantan TKI harus menyesuaikan kembali hidup mereka dengan kondisi di daerah setempat. Hal ini akan dirasakan sulit terutama bagi mereka yang sudah bekerja di luar negeri dalam waktu lama. Salah satu penyesuaian yang harus mereka lakukan adalah hidup di tengah keterbatasan kesempatan kerja dan bekerja dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang mereka terima di negara tempat bekerja sebelumnya.

Keterbatasan kesempatan kerja di daerah asal merupakan salah satu faktor pendorong sebagian tenaga kerja asal Desa Sukorejo Wetan untuk bekerja di luar negeri. Alasan yang sama juga berlaku bagi mereka yang sudah kembali namun mengalami kesulitan untuk bekerja di daerah asal. Hal ini dikemukakan oleh beberapa narasumber seperti terlihat dalam kutipan-kutipan berikut.

“Kalau di rumah banyak nganggurnya, jarang ada kerja. Lama-lama kan ndak betah, jadinya ingat terus di Malaysia, setiap hari ada kerja. Kalau di rumah bengong, di Malaysia sehari itu sudah dapat berapa ringgit. Saya rencana mau kembali, bos yang lama sudah tanya kapan mau balik... karena ekonomi, bukan tidak betah di kampung karena pekerjaan di sini susah...” (Bapak HP, mantan TKI di Malaysia)

“Pingin kembali ke Taiwan, di rumah itu cuma diam ndak bisa dapat duit...ndak ada kerja. Ini lagi nunggu, sudah proses mau berangkat lagi ke Taiwan sama PT-nya pak D (seorang yang bekerja merekrut TKI)... bukan karena sepi tapi ndak ada kerja.” (Nr, seorang gadis mantan TKI perawat orang tua di Taiwan)

Selain kesempatan kerja yang terbatas, perbedaan upah antara di daerah asal dan di luar negeri menjadi faktor penarik mantan TKI untuk kembali melakukan migrasi, khususnya ke negara tempat mereka biasa bekerja. Ini sejalan dengan berbagai teori tentang migrasi internasional seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Kebiasaan menerima gaji dalam jumlah lebih besar di luar negeri menyebabkan mantan TKI mengalami kesulitan beradaptasi dengan upah di dalam negeri. Akibatnya, bermigrasi kembali menjadi pilihan bagi mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar, sebagaimana dikemukakan oleh seorang narasumber dalam kutipan berikut.

“Jadi tukang di kampung hasilnya ndak seberapa, kalau di Malaysia kuli saja bisa dapat seratus ribu sehari. Kalau ngandalin kerja nukang di rumah sulit, lebih baik pergi ke Malaysia lagi kerja ngumpul duit.” (Bapak N, mantan TKI di Malaysia)

Dari wawancara dengan beberapa narasumber di atas, permasalahan klasik berupa keterbatasan kesempatan kerja serta perbedaan upah dengan negara lain masih menjadi faktor yang memengaruhi keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini lebih berpengaruh pada mereka yang sudah punya pengalaman bekerja di luar negeri. Bahkan ada diantaranya yang berkali-kali bekerja ke luar negeri dan baru menetap lagi di kampung setelah kemampuan fisiknya menurun, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Kita ya sudah ndak bisa kerja lagi, sudah remuk ini badan. Kerja tukang itu berat, perlu tenaga... Sudah lama saya kerja jadi tukang, sekarang sudah ndak kuat, gantian istri yang kerja ke Malaysia... Kalau ada orang yang nyuruh kerja ya bisa punya uang, kalau ndak ada ya ndak punya uang, tunggu kiriman istri. Ndak punya uang ya utang dulu sama tetangga.” (Bapak Sn, mantan TKI di Malaysia).

⁵ Pengeluaran untuk kebutuhan sosial yang besar juga dialami oleh keluarga TKI di daerah lain. Di Indramayu, umpamanya, penyelenggaraan hajatan seperti perayaan sunatan anak memerlukan biaya yang besar dan adakalanya mendorong orang tua (laki-laki atau perempuan) untuk bekerja ke luar negeri guna memperoleh uang untuk

kegiatan tersebut (Raharto dkk., 2013). Meskipun keluarga yang punya hajat akan memperoleh sumbangan dari orang-orang yang datang, tetap saja diperlukan biaya yang besar untuk menyelenggarakannya.

Pernyataan Bapak Sn makin memperkuat kenyataan bahwa bekerja ke luar negeri lebih menjadi pilihan dibanding di dalam negeri. Alasan penghasilan lebih besar yang diperoleh di luar negeri sehingga menarik mantan TKI untuk bermigrasi kembali juga ditemukan di berbagai daerah lain, yaitu di beberapa daerah pengirim migran Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur serta daerah transit di Provinsi Riau (Romdiati dkk., 2002). Dengan demikian, selama masih terdapat perbedaan upah antara di daerah asal dan di negara tujuan, migrasi kembali tenaga kerja migran tidak dapat dihindarkan.

Keterbatasan kemampuan untuk berwirausaha

Idealnya, bekerja ke luar negeri merupakan kesempatan untuk mengumpulkan modal finansial karena bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar. Modal tersebut selanjutnya digunakan untuk membuka usaha ekonomi yang memungkinkan mereka tidak lagi bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Praktik ini sudah dilaksanakan oleh mantan migran di beberapa daerah lain seperti di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta (Anwar, 2015). Sedangkan Demurger & Xu (2011) menemukan bahwa di salah satu perdesaan Cina mantan migran lebih memilih untuk menjadi wiraswasta dengan melakukan berbagai usaha ekonomi menggunakan modal yang berasal dari penghasilan selama bekerja di perkotaan dibandingkan dengan nonmigran.

Beberapa mantan TKI di lokasi penelitian sebenarnya sudah melakukan usaha ekonomi mandiri (berwirausaha) agar tidak tergantung pada ketersediaan kesempatan kerja. Namun demikian, sebagian usaha tersebut tidak bertahan lama karena berbagai alasan. Pertama, banyak di antara mereka melakukan usaha yang sama, kemungkinan karena tidak bisa memilih alternatif usaha yang lain. Kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan adalah membuka warung dengan menjual berbagai kebutuhan sehari-hari (penduduk setempat menyebutnya dengan istilah *pracangan*). Banyaknya warung yang menjual barang sejenis menyebabkan persaingan dalam usaha ini menjadi makin ketat, yang berujung pada penurunan penjualan. Ini dikemukakan oleh salah seorang narasumber seperti dalam kutipan berikut.

“Sekarang semua pada buka warung, kalau dulu memang sedikit warungnya tapi lama-lama tambah banyak. Kalau terlalu banyak warung padahal yang beli cuma orang-orang sini saja, ya gimana...” (Bapak Su, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Sukorejo Wetan)

Sebenarnya sudah ada upaya untuk memberdayakan migran purna dengan memberikan keterampilan untuk berusaha, seperti yang dilakukan oleh LSM Pr. Kegiatan peningkatan keterampilan yang dilakukan antara lain berupa pelatihan membuat bordir, beternak kambing, dan tata boga. Pelaksanaan pelatihan membuat bordir khususnya difasilitasi oleh pemerintah (wawancara dengan bapak Z, pengurus LSM Pr).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, LSM Pr membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan aktivitas yang menjadi minat para peserta. Kegiatan pelatihan dilakukan dalam kelompok. Selain kegiatan peningkatan keterampilan, diadakan pertemuan rutin anggota kelompok yang diselenggarakan setiap satu atau dua bulan. Dalam pertemuan yang dilaksanakan para anggota kelompok berbagi pengetahuan dan informasi, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola usaha ekonomi.

Masih dalam konteks pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi produktif, pemerintah daerah, melalui UPT P3TKI (Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Provinsi Jawa Timur juga telah membekali mantan TKI dengan berbagai pelatihan keterampilan. Pelatihan yang telah dilaksanakan adalah membuat kue, yang kemudian diikuti dengan pemberian stimulan berupa peralatan memasak, yaitu blender, mikser, timbangan makanan, dan oven. Peserta kegiatan berasal dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan seleksinya diserahkan pada pihak kabupaten, dengan persyaratan tidak berkeinginan untuk kembali bekerja ke luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari BNP2TKI (wawancara dengan pegawai UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur). Namun sayangnya, mereka yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan sangat terbatas karena keterbatasan dana untuk itu. Selain itu, kegiatan pelatihan yang dilakukan hanya terbatas pada keterampilan membuat kue, sehingga mereka yang tidak berminat terhadap kegiatan tersebut tidak mendapatkan manfaatnya.

BNP2TKI sesungguhnya mempunyai program pemberdayaan bagi mantan TKI, terutama bertujuan agar mereka dapat memanfaatkan remitansi untuk kegiatan ekonomi produktif. Di salah satu desa pengirim TKI di DI Yogyakarta telah diselenggarakan pelatihan bagi kelompok penduduk ini, mencakup beberapa jenis keterampilan, mulai dari membuat jenis-jenis produk seperti *nata de coco* dan deterjen sampai dengan mengelola keuangan serta membangun mental pengusaha (Anwar, 2015). Namun demikian,

lagi-lagi kegiatan tersebut tidak mencapai hasil optimal, antara lain karena terbatasnya jumlah mantan TKI yang bisa mengikuti pelatihan akibat keterbatasan dana yang disediakan.

Alasan kedua yang menyebabkan tidak bertahannya usaha ekonomi mantan TKI adalah terbatasnya kemampuan pengelolaan keuangan. Keterbatasan ini menyebabkan modal yang sudah digunakan untuk usaha tidak dapat berputar dan lama kelamaan usaha yang dijalankan menjadi bangkrut. Oleh karena itu, pemberdayaan mantan TKI, termasuk untuk pengelolaan keuangan sangat diperlukan agar usaha mereka bisa berkembang dan pada akhirnya mereka tinggal menetap di daerah asal.

LSM Pr juga melakukan kegiatan yang bertujuan membantu para buruh migran dalam mengelola remitansi untuk mengembangkan usaha ekonomi dan juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelolanya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LSM ini adalah pelatihan pengelolaan keuangan bagi buruh migran dan keluarganya, yang berada di bawah payung “Program Melek Anggaran Masyarakat”. Program ini mencakup materi pemanfaatan remitansi dan pengiriman uang kepada keluarga di daerah asal.

Keberadaan jaringan sosial

Sejalan dengan sejarah panjang migrasi internasional penduduk Desa Sukorejo Wetan (dan Kabupaten Tulungagung secara umum), jaringan sosial penduduk setempat di negara tujuan, khususnya di Malaysia, juga sudah kuat. Jaringan sosial ini berupa keberadaan migran dari daerah asal yang sama, baik yang memiliki hubungan keluarga/kerabat dengan mantan TKI maupun tidak. Sebagian migran dari daerah ini sudah berstatus *permanent resident* di Malaysia, yang dibuktikan dengan kepemilikan IC (*identity card*) yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tetangga tersebut. Tidak jarang pula di antara mereka sudah memiliki usaha yang mempekerjakan orang lain, misalnya kontaktor bangunan.

Keberadaan orang-orang yang berasal dari Tulungagung memfasilitasi mereka yang sudah pulang ke daerah asal untuk kembali menjadi TKI di Malaysia. Adakalanya keberadaan mereka menjadi jaminan untuk mendapat pekerjaan, sehingga mereka yang bekerja di sektor konstruksi, khususnya, berkeinginan untuk kembali ke Malaysia. Selain itu, hal tersebut menyebabkan TKI merasa aman karena berada di sekitar orang-orang yang dikenal yang tidak jarang memberi bantuan dalam memperoleh pekerjaan,

sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang narasumber dalam kutipan berikut.

“Beda kerja di Malaysia dan Indonesia...di Malaysia cuma tukang saja...kalau di Jakarta ndak punya kenalan, ndak ada yang bawa, kalau di Malaysia banyak kenalan.” (Bapak SB, mantan TKI di Malaysia)

Tidak hanya jaringan sosial di luar negeri, kemudahan untuk berangkat ke luar negeri juga didapatkan di daerah asal. Salah satu kemudahan itu adalah keberadaan pihak yang menempatkan TKI ke luar negeri, yaitu perusahaan swasta yang mempunyai tenaga perekrut sampai ke desa-desa. Ini memudahkan mereka yang berkeinginan untuk kembali bekerja ke luar negeri. Jika dikaitkan dengan pendapat Van Hear dkk. (2012) sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan faktor antara (*mediating factor*) berperan dalam terjadinya migrasi berulang tenaga kerja Indonesia, sebagaimana migrasi yang dilakukan untuk pertama kali.

KESIMPULAN

Salah satu strategi yang dilakukan sebagian TKI untuk menyiasati keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri adalah bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara maju yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Selain itu, perbedaan upah di negara asal dan negara tujuan berkontribusi untuk terjadinya migrasi tenaga kerja internasional. Dikarenakan berbagai faktor yang memfasilitasi aktivitas migrasi seperti kemudahan memperoleh beragam informasi mengenai negara tujuan dan kemudahan transportasi serta komunikasi, arus migrasi tenaga kerja internasional menjadi semakin besar dengan arah yang juga makin luas. Fenomena migrasi internasional yang terjadi di antara tenaga kerja migran asal Indonesia mengonfirmasi teori-teori yang telah dikemukakan oleh banyak ahli.

Bekerja sebagai tenaga kerja migran di luar negeri tidak hanya untuk mendapat penghasilan, yang pada kenyataannya lebih besar dibanding pendapatan dengan pekerjaan yang sama di dalam negeri. Idealnya, kesempatan ini juga menjadi cara untuk mengakumulasi modal finansial melalui tabungan, baik dari remitansi maupun tabungan di luar negeri, yang akan digunakan sebagai modal untuk membuka kegiatan ekonomi (berwirausaha) setelah kembali ke daerah asal. Hal ini terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses memperoleh kredit untuk modal usaha. Dengan menjadi wirausaha, para mantan migran tidak lagi tergantung pada kesempatan kerja yang tersedia dan bahkan bisa menciptakan kesempatan kerja di daerah asal.

Dalam kenyataannya, harapan ideal tersebut tidak selamanya ditemui di daerah asal. Penelitian ini menemukan sebagian mantan migran yang sudah pulang ke daerah asal melakukan migrasi kembali ke luar negeri untuk bekerja. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa alasan dominan yang menyebabkan terjadinya fenomena ini, yaitu penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerah asal dan jika bekerja pun penghasilan yang diperoleh lebih kecil daripada di luar negeri, keterbatasan kemampuan dalam mengelola kegiatan ekonomi sehingga tidak dapat bertahan, serta adanya jaringan sosial yang memfasilitasi migrasi kembali.

Agar dapat bekerja secara mandiri/menjadi wirausaha, mantan migran tidak cukup hanya dengan memiliki modal usaha. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka, mulai dari pengetahuan mengenai berbagai jenis usaha ekonomi yang potensial untuk dijalankan, produksi barang serta jasa yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, pemasaran produk, sampai dengan pengelolaan keuangan. Hal ini memungkinkan usaha mereka dapat bertahan lama. Bagi mereka yang tidak ingin berwirausaha, upaya yang sangat diperlukan adalah penciptaan kesempatan kerja disertai dengan upah yang bersaing, sehingga bekerja di dalam negeri, khususnya di daerah asal, menjadi pilihan yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazi, E., & Mema, M. (2007). *The potentials of remittances for income generating activities leading to local economic development in Albania: The case of Durres*. Diakses dari http://www.albania.iom.int/Remittance/en/Durres_The%20potentials%20of%20remittances.pdf
- Adams Jr, R. H., & Cuecuecha, A. (2014). Remittances, household investment and poverty in Indonesia. Dalam R. H. Adams Jr & A. Ahsan (Ed.), *Managing international migration for development in East Asia* (hal. 29-52). Washington DC: World Bank.
- Adams Jr, R. H., & Page, J. (2005). Do internal migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33(10), 1645-1669.
- Anwar, R. P. (2013). Remittances and village development in Indonesia: The case of former migrant workers in South Korea from Ngoro-oro Village in Yogyakarta Special Region Province. *Thammasat Review*, 16, 99-119.
- _____. (2015). *Return migration and local development in Indonesia*. Diakses dari <http://www.multi-culture.co.kr/pages/board/tool/imgDown.php?file=378>
- Arifuzzaman, S.M., Al Mamun, S. A., Chowdhury, N. H., & Dewri, L. V. (2015). How the remittance from Bangladeshi migrant workers are being utilized at home? *IOSR Journal of Business and Management*, 17(4:III), 18-28.
- Bank Indonesia. (2010). *Report on national survey on foreign workers in Indonesia 2009*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/en/publikasi/lain/lainnya/Documents/aacfab73b1e46c5a691e1dfff9fc8SurveiTKAInggris.pdf>
- Bank Indonesia. (tanpa tahun-a). *Remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) menurut negara penempatan* [Data]. Diakses dari http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf
- _____. (tanpa tahun-b). *Remitansi tenaga kerja asing (TKA) menurut negara asal* [Data]. Diakses dari http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_32.pdf
- Black, R., King, R., & Tiemoko, R. (2003, March). *Migration, return, small enterprise development in Ghana: A route out of poverty?* (Sussex Migration Working Paper No. 9). Brighton: Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia [BNP2TKI]. (2011, 27 Februari). *Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI*. Diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>
- _____. (2016, 25 Agustus). *BNP2TKI: Remitansi TKI Mencapai 62 Triliun*. Diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id/read/11560/BNP2TKI:-Remitansi-TKI-Mencapai-Rp-62Triliun>
- Bodvarsson, O. O., & Van den Berg, H. (2013). *The economics of immigration: Theory and policy*, doi:10.1007/978-1-4614-2116-0
- Cabegin, E. C. A., & Alba, M. (2014). More or less consumption? The effects of remittances on Filipino household spending behavior. Dalam R. H. Adams Jr & A. Ahsan (Ed.). *Managing International Migration for Development in East Asia* (hal. 53-83). Washington DC: World Bank.
- Constant, A. F., Nottmeyer, O., & Zimmermen, K. F. (2012). *The economics of circular migration* (Discussion Paper Series Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit No. 6940). Diakses dari <http://hdl.handle.net/10419/67308>
- Czaika, M. & de Haas, H. (2014). The globalization of migration: Has the world become more migratory? *International Migration Review*, 48(2), 283-285. doi:10.1111/imre.12095

- de Haas, H. (2006). Migration, remittances and regional development in Southern Morocco. *Geoforum*, 37(4), 565-580. doi:10.1016/j.geoforum.2005.11.007
- . (2008). *Migration and development: A theoretical perspective* (Working Paper 9). Oxford: International Migration Institute, James Martin 21st Century School, University of Oxford.
- de Haas, H., & Fokkema, T., (2011). The effects of integration and transnational ties on international return migration intentions. *Demographic Research*, 25(24), 755-782. doi: 10.4054/DemRes.2011.25.24
- Demurger, S., & Xu, H. (2011). Return migrants: The rise of new entrepreneurs in rural China. *World Development*, 39(10), 1847-1861. doi: 10.1016/j.worlddev.2011.04.027
- Dustmann, C. (1997). Return migration, uncertainty and precautionary savings. *Journal of Development Economic*, 52, 295-316.
- Dustmann. C., & Mestres, J. (2008). *Remittances and temporary migration* (Discussion Paper Series CDP No. 09.0). London: Centre for Research and Analysis of Migration, Department of Economics, University of College London.
- Hatton, T., & Williamson, J. (2002). *What fundamental drive world migration?* (Discussion Paper No. 458). Canberra: Centre for Economic Research, Australian National University.
- Lee, E.S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47-57.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal". *Population and Development Review*, 19(3), 431-466.
- McKenzie, D. J. (2006). Beyond remittances: The effects of migration on Mexican households. Dalam C. Ozden & M. Schiff (Ed.), *International migration, remittances, and the brain drain* (hal. 123-147). Washington DC: The World Bank and Palgrave Mcmillan.
- McKenzie, S., & Menjivar, C. (2011). The meanings of migration, remittances and gifts: Views of Honduran women who stay. *Global Networks*, 11(1), 63-81. doi:10.1111/j.1471-0374.2011.00307.x
- Nguyen, T., & Purnamasari, R. (2014). Impact of international migration and remittances on child outcomes and labor supply in Indonesia: How does gender matter? Dalam R. H. Adams Jr & A. Ahsan (Ed.), *Managing international migration for development in East Asia* (hal. 84-110). Washington DC: World Bank.
- Noveria, M., Romdiati, H., Setiawan, B., & Malamassam, M. A. (2010). *Pekerja migran di luar negeri: Dampak terhadap kehidupan dan daerah asal*. Manuskrip tidak diterbitkan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta.
- Orbeta Jr, A. C. (2013, Februari). *Enhancing labor mobility in ASEAN: Focus on lower-skilled workers* (PIDS Discussion Paper Series No. 2013-17). Makati City: Philippine Institute for Development Studies.
- Palmer, W. (2016). *Indonesia's overseas labour migration programme, 1969-2010*. Leiden: Koninklijke Brill.
- Piracha, M., & Vadean, F. (2010). Return migration and occupational choice: Evidence from Albania. *World Development*, 38(8), 1141-1155. doi:10.1016/j.worlddev.2009.12.015.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI. (2016). *Data penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia tahun 2016*. Diakses dari http://www.bn timer2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
- Raharto, A., Noveria, M., Romdiati, H., Fitranita, Malamassam, M. A., & Hidayati, I. (2013). Indonesian labour migration: Social cost and families left behind. Dalam *Valuing the social cost of migration: An exploratory study* (hal.19-71). Bangkok: UN Women.
- Ratha, D. (2005, Januari). *Workers' remittances: An important and stable sources of external development finance* (Economics Seminar Series Paper 9). Diakses dari http://repository.stcloudstate.edu/econ_seminars/9
- . (2013, September). *The impact of remittances on economic growth and poverty reduction* (Policy Brief No. 8). Washington DC: Migration Policy Institute.
- Romdiati, H., Noveria, M., & Bandiyono, S. (Ed.) (2002). *Kebutuhan informasi bagi tenaga kerja migran Indonesia: Studi kasus di Propinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Riau* (Seri Penelitian PPK-LIPI, No. 39/2002). Jakarta: PPK LIPI.
- The Global Comission on International Migration. (2005, Oktober). *Migration in an interconnected world: New direction for action* (Report of the Commission on International Migration). Switzerland: SRO-Kundig
- United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]. (2011). *Impact of remittances on poverty in developing countries*. Diakses dari http://unctad.org/en/docs/ditctncd20108_en.pdf
- Van Hear, N., Bakewell, O., & Long, K. (2012, Maret). *Driver of migration* (Migration Out of Poverty Research Programme Consortium Working Paper No.1). Brighton: University of Sussex.